



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**DECREE OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**NO : 007/BOD<sub>\_</sub>REA/P/IV/2020, as amended September 2021**

**KEBIJAKAN TIDAK ADA DEFORESTASI, TIDAK ADA GAMBUT,  
TIDAK ADA EKSPLOITASI (NDPE)**

**NO DEFORRESTATION, NO PEAT, NO EXPLOITATION (NDPE) POLICY**

**R.E.A. HOLDINGS PLC**

**PT REA KALTIM PLANTATIONS GROUP DAN ANAK PERUSAHAANNYA**

**PT REA KALTIM PLANTATIONS AND SUBSIDIARIES**

References to REA and the group mean R.E.A. Holdings plc, PT REA Kaltim Plantations and all group companies.

In 2015, REA established a set of policies that underpin the group's commitment to sustainable practices. These policies cover business ethics, responsible development, environment and biodiversity conservation, human rights, and health and safety. To further clarify the group's commitment to sustainable development, REA has adopted a supplementary policy: No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE).

Kebijakan ini berlaku untuk REA yang berarti meliputi R.E.A. Holdings Plc, PT REA Kaltim Plantations dan seluruh anak perusahaan.

Pada tahun 2015, REA menetapkan serangkaian kebijakan yang mendukung komitmen perusahaan untuk menerapkan praktik berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup etika bisnis, pembangunan yang bertanggung jawab, konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, serta kesehatan dan keselamatan. Untuk lebih memperjelas komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, REA telah mengadopsi kebijakan tambahan: Tidak ada Deforestasi, Tidak ada Gambut, Tidak ada Eksplorasi (NDPE).

REA recognises 15 November 2018 as the cut-off date for supplier compliance with all provisions of the NDPE policy.

### No deforestation

*REA commits to no development of High Carbon Stock (HCS) forests, High Conservation Value (HCV) areas and / or in natural ecosystem areas that have unique values and ecological carrying capacity as described in the Accountability Framework Initiative (AFi).*

- REA commits to no conversion of any natural ecosystem to another land use including no significant changes to the species composition, structure or function of any natural ecosystem.
- All HCS forests and HCV areas are maintained and actively managed by REA's dedicated conservation team, in collaboration with government, NGOs and scientific institutions as required.
- Employees and third parties are prohibited from clearing, cultivating or conducting illegal activities in HCV and/or HCS areas.
- REA commits to the restoration of all non compliant deforestation and land use conversion. This includes the restoration of HCS forests, HCV areas, peatlands and other ecologically and culturally significant lands in consultation with independent experts and in accordance with accepted international industry certification standards.
- an HCS assessment (HCSA) and an HCV assessment are conducted by an independent assessor prior to any development within an HGU area where the RSPO New Plantings Procedure was undertaken after 1 January 2015. For areas where the RSPO New

REA menyatakan bahwa tanggal 15 November 2018 sebagai batas waktu terhadap kepatuhan pemasok terhadap semua ketentuan kebijakan NDPE

### Tidak ada deforestasi

*REA berkomitmen untuk tidak mengembangkan perkebunan di kawasan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT), kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan/atau di kawasan ekosistem alami yang memiliki keunikan nilai dan daya dukung ekologis seperti yang dijelaskan didalam Accountability Framework Initiative (AFi).*

- REA berkomitmen untuk tidak melakukan konversi terhadap ekosistem alami apapun menjadi penggunaan lahan lainnya termasuk tidak ada perubahan signifikan pada komposisi spesies, struktur atau fungsi ekosistem alami.
- Semua hutan dengan stok karbon tinggi (SKT) dan kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) dijaga dan dikelola secara aktif oleh REA melalui tim konservasi khusus, bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan lembaga ilmiah sesuai kebutuhan.
- Semua karyawan dan pihak ketiga dilarang membuka lahan, budidaya, atau melakukan kegiatan ilegal di area NKT dan/atau hutan SKT.
- REA berkomitmen untuk merestorasi semua jenis deforestasi dan konversi penggunaan lahan yang tidak sesuai. Termasuk merestorasi kawasan hutan dengan stok karbon tinggi (SKT), kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT), lahan gambut, dan kawasan penting lainnya secara ekologis dan budaya dengan berkonsultasi kepada para ahli independen dan sesuai dengan standar sertifikasi industri internasional yang diterima.
- penilaian Stock Karbon Tinggi (SKT) akan dilakukan oleh penilai independen sebelum pengembangan di seluruh kawasan HGU dimana Prosedur Penanaman Baru RSPO dilakukan setelah 1 Januari 2015. Untuk kawasan dimana Prosedur Penanaman Baru

Planting Procedure was undertaken after 15 November 2018, this assessment is conducted by an independent HCV-HCS ALS (Assessor License Scheme) assessor.

Further information regarding these commitments can be found in the Responsible Development Policy (005 /BOD\_REA/ P/ II /2015, as amended September 2020) and Environment and Biodiversity Conservation Policy (003 /BOD\_REA/ P/ II / 2015, as amended September 2020).

#### No peat

*REA will not develop, plant in or source FFB from areas that have been identified as peatland, regardless of depth.*

- REA is committed to following best management practices for its existing plantations on peat in consultation with independent experts and in accordance with accepted international industry certification standards.
- REA commits to peat restoration where applicable, in consultation with independent experts and in accordance with accepted international industry certification standards.

Further information regarding these commitments can be found in the Responsible Development Policy (005 /BOD\_REA/ P/ II /2015, as amended September 2020) and Environment and Biodiversity Conservation Policy (003 /BOD\_REA/ P/ II / 2015, as amended September 2020).

#### No exploitation of people

*REA is committed to ensuring that the rights of all people working in any of its operations are respected in accordance with local, national and international laws.*

- The group supports indigenous and local communities' and workers' rights based on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and ILO

RSPO dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 penilaian dilakukan oleh penilai NKT-SKT independen berlisensi ALS (Assesor License Scheme).

Informasi lebih lanjut mengenai komitmen ini dapat ditemukan didalam Kebijakan Pembangunan Bertanggung Jawab (005 / BOD\_REA / P / II / 2015, diperbarui pada September 2020) dan Kebijakan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (003 / BOD\_REA / P / II / 2015, diperbarui pada September 2020).

#### Tidak ada gambut

*REA tidak akan mengembangkan, menanam di atau memperoleh sumber TBS dari kawasan yang telah diidentifikasi sebagai lahan gambut, terlepas dari berapapun kedalamannya.*

- REA berkomitmen untuk menerapkan praktik manajemen terbaik untuk perkebunan yang sudah ada di lahan gambut dengan berkonsultasi kepada para ahli independen dan sesuai dengan standar sertifikasi industri internasional yang diterima.
- REA berkomitmen untuk merestorasi lahan gambut jika diperlukan, dengan berkonsultasi kepada para ahli independen dan sesuai dengan standar sertifikasi industri internasional yang diterima.

Informasi lebih lanjut mengenai komitmen ini dapat ditemukan didalam Kebijakan Pembangunan Bertanggung Jawab (005 / BOD\_REA / P / II / 2015, diperbarui pada September 2020) dan Kebijakan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (003 / BOD\_REA / P / II / 2015, diperbarui pada September 2020).

#### Tidak ada eksplorasi

*REA berkomitmen untuk memastikan bahwa hak semua orang yang bekerja di seluruh operasi perusahaan dihormati sesuai dengan hukum setempat, nasional, dan internasional.*

- Perusahaan mendukung hak masyarakat adat, masyarakat local dan pekerja berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat

Indigenous and Tribal Peoples Convention (no. 169).

- REA is committed to respect and protect the rights of children and their welfare, and does not tolerate child labour, any form of child exploitation or child abuse.
- An independent and participatory Social Impact Assessment (SIA) will be conducted prior to land development within the HGU area. Measures to mitigate potential negative social impacts and to create positive social impacts will be incorporated into the planning and management of all new developments.
- **The Free, Prior & Informed Consent (FPIC) of local communities is obtained prior to development:** REA endeavours to ensure that everyone with legal, customary (or traditional) land tenure and / or ownership and/or access/use rights to the land is identified and fully understands the positive and negative implications of the proposed land development within the HGU area.
- REA is committed to support the inclusion of smallholders in their operations and develops smallholder schemes for the benefit of local communities in accordance with applicable Indonesian regulations.
- REA identifies and implements measures to provide remediation where the company has caused or contributed to negative impacts to human rights, including the rights of communities and the workforce.
- REA will resolve all complaints and conflicts in a timely manner through an open, transparent and consultative process.

Further information regarding these commitments can be found in REAH's Human Rights Policy (002 /BOD\_REA/ P/ II /2015, as amended September 2020) and Responsible

Adat (UNDRIP) dan ILO mengenai Konvensi Masyarakat Adat dan Suku Bangsa (no. 169).

- REA berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak dan kesejahteraannya, dan tidak menoleransi pekerja anak, segala bentuk eksplorasi anak atau pelecehan anak.
- Penilaian Dampak Sosial (PDS) yang independen dan partisipatif akan dilakukan sebelum pengembangan lahan di dalam kawasan HGU. Langkah-langkah untuk mengurangi potensi dampak sosial negatif dan untuk mengembangkan dampak sosial positif akan dimasukkan ke dalam perencanaan dan pengelolaan semua pengembangan baru.
- **Persetujuan Bebas, Didahulukan & Diinformasikan (PADIATAPA) dari masyarakat setempat akan diperoleh sebelum, selama dan setelah pembangunan:** REA akan berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang dengan hak hukum, hak adat atau hak pengguna lahan yang telah diidentifikasi sepenuhnya memahami implikasi positif dan negatif dari rencana pengembangan kelapa sawit.
- REA berkomitmen untuk mendukung keikutsertaan petani dalam operasi perusahaan dan mengembangkan petani plasma untuk kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan Indonesia yang berlaku.
- REA telah mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah untuk memberikan remediasi dimana perusahaan telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak negatif hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat dan tenaga kerja.
- REA akan menyelesaikan semua keluhan dan konflik secara tepat waktu melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif.

Informasi lebih lanjut mengenai komitmen ini dapat ditemukan dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia (002 / BOD\_REA / P / II / 2015), diperbarui pada September 2020) dan Kebijakan Pembangunan Bertanggung Jawab (005 /

Development Policy (005 /BOD\_REA/ P/ II /2015, as amended September 2020). BOD\_REA / P / II / 2015, diperbarui pada September 2020).

**Scope:** this policy applies to the operations of any company within the REA group and all of its employees. This includes all third party contractors operating within REA's plantations, as well as all associated and independent smallholders and all suppliers.

**Implementation:** the commitments outlined in this policy are implemented through regulations and various standard operating procedures for any company within REA. Senior management will review and revise this policy as necessary to meet the evolving expectations of its stakeholders and the sustainability standards to which it has committed.

PT REA Kaltim Plantations  
President Director

**Luke M.D. Robinow**  
9 September 2021

**Lingkup:** Kebijakan ini berlaku untuk operasi perusahaan di seluruh perusahaan dibawah REA Grup dan semua karyawan. Termasuk berlaku untuk semua kontraktor pihak ketiga yang beroperasi di perkebunan REA, semua petani mandiri dan kemitraan serta seluruh pemasok.

**Pelaksanaan:** komitmen yang diuraikan dalam kebijakan ini akan dilaksanakan melalui peraturan perusahaan dan berbagai prosedur operasi standar. Manajemen senior REA akan meninjau dan merevisi kebijakan jika diperlukan untuk memenuhi harapan yang berkembang dari para pemangku kepentingan dan standar keberlanjutan yang telah dilakukan.

R.E.A. Holdings plc  
Managing Director

**Carol E. Gysin**  
9 September 2021